

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan manifestasi nyata dari prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, muncul fenomena calon tunggal yang berhadapan dengan “kotak kosong”, yang membuka ruang diskursus baru dalam aspek legalitas dan legitimasi dalam pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai legalitas kemenangan kotak kosong dalam Pilkada serta mengkaji implikasi yuridis dari penetapan calon terpilih yang memperoleh suara kurang dari 50% + 1.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, keberadaan calon tunggal dan kolom kosong telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Legalitas kotak kosong sebagai bentuk kontrol demokratis diakui dalam konteks perlindungan hak konstitusional warga negara untuk menerima atau menolak calon tunggal. Kemenangan kotak kosong mengindikasikan adanya krisis representasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pilihan yang tersedia, sehingga berimplikasi pada pemungutan suara ulang dan penguatan peran rakyat dalam menentukan keterwakilan politik. Putusan MK dalam kasus Pilkada Banjarbaru (Putusan MK Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan mempertegas pentingnya syarat legitimasi demokrasi dan mekanisme korektif dalam demokrasi lokal.

Kata Kunci: Pilkada, Kotak Kosong, Legitimasi Demokrasi, Calon Tunggal, Implikasi Yuridis.

ABSTRACT

Regional Head Elections (Pilkada) are a concrete manifestation of the principle of popular sovereignty in Indonesia's democratic system. However, in practice, the phenomenon of single candidates facing an "empty box" has emerged, opening up new discourse on the legality and legitimacy of elections. This study aims to analyze the legal provisions regarding the legality of the "empty box" victory in regional elections and examine the legal implications of declaring a candidate elected who receives less than 50% + 1 vote.

The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach.

The results show that legally, the existence of single candidates and the "empty box" is regulated by Law Number 10 of 2016 and reinforced by Constitutional Court Decision Number 100/PUU-XIII/2015. The legality of the "empty box" as a form of democratic control is recognized in the context of protecting citizens' constitutional rights to accept or reject a single candidate. The victory of the "empty box" indicates a crisis of representation and public distrust of the available options, thus implicating a revote and strengthening the role of the people in determining political representation. The Constitutional Court's decision in the Banjarbaru Pilkada case (MK Decision Number 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025) emphasizes the importance of the requirements for democratic legitimacy and corrective mechanisms in local democracy.

Keywords: *Regional Election, Empty Box, Legitimacy of Democracy, Single Candidate, Legal Implications*